

PASANG SURUT POLARISASI ELIT DI DALAM ETNIS BUGIS DAN MAKASSAR

Tidal Polarization in Elite Ethnic and Makassar Bugis

Imam Mujahidin Fahmid^{*)}, Arya Hadi Dharmawan, Lala M. Kolopaking, Darmawan Salman

Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat

^{*)} Email : mujahidin@yahoo.com

Diterima 20 Juni 2011/ Disetujui 11 September 2012

ABSTRACT

In the traditional phase, elite ethnic Bugis and Makassar together to develop the concept of political symbols. Symbolic political tradition was contained in a manuscript imaginative; Tomanurung and Kalompoang. A concept to legitimize the authority of the ruler. Socially, the concept Tomanurung then translated by the elite and the masses as a pattern of relationships which are mutually protect; patron-client. In the course of the Bugis and Makassar politics, increasingly weakened Tomanurung concept, beginning with the Islamic presence in the Palace of Gowa, and increasing political desire of the rulers of the kingdom. Seizure of territory and political polarization between ethnic Bugis and Makassar continue escalate, culminating in the 17th century, when the VOC and the White-Bone Palakka of Gowa empire conquered. Since the victory of the Sultanate of Gowa VOC, ethnic Bugis became the dominant ethnic formal power structure. The role of ethnic Bugis somewhat reduced when turning hostile kingdom VOC Bone in 1905. Then the power structure dominated by the palace of Gowa back to the initial phase of the independence of Indonesia. Medieval Old Order until the beginning of reform, ethnic Bugis returned carrying power. Now, through direct election leaders (governors) directly (in the era of regional autonomy), power stage in South Sulawesi, Makassar ethnic recaptured by Gowa.

Keywords: elite, Tomanurung, ethnic, symbol, power, polarization.

ABSTRAK

Pada fase tradisional, elit etnis Bugis dan Makassar sama-sama mengembangkan konsep politik simbol. Tradisi politik simbolik itu tertuang dalam naskah imajinatif; *tomanurung dan kalompoang*. Sebuah konsep untuk melegitimasi kekuasaan sang penguasa. Secara sosial, konsep *tomanurung* kemudian diterjemahkan oleh elit dan massa sebagai pola hubungan yang bersifat saling melindungi; *patron-client*. Dalam perjalanan politik orang Bugis dan Makassar, konsep *tomanurung* kian melemah, diawali dengan kehadiran Islam di Istana Gowa, dan meningkatnya birahi politik para penguasa kerajaan. Perebutan wilayah kekuasaan dan polarisasi politik antara etnis Bugis dan Makassar terus mengalami eskalasi, puncaknya pada abad 17, ketika VOC dan Arung Palakka dari Bone berhasil menaklukkan kesultanan Gowa. Sejak kemenangan VOC terhadap Kesultanan Gowa, etnis Bugis menjadi etnis yang dominan dalam struktur kekuasaan formal. Peranan etnis Bugis agak berkurang ketika VOC balik memusuhi kerajaan Bone pada 1905. Struktur kekuasaan kemudian dikuasai kembali oleh istana Gowa hingga fase awal kemerdekaan RI. Pertengahan Orde Lama hingga awal reformasi, etnis Bugis kembali memanggul kekuasaan. Kini melalui pemilihan langsung pemimpin (gubernur) secara langsung (pada era otonomi daerah), panggung kekuasaan di Sulsel direbut kembali oleh etnis Makassar Gowa.

Kata Kunci: elit, tomanurung, etnis, simbol, kekuasaan, polarisasi.

PENDAHULUAN

Tema tentang etnisitas sebagai simbol identitas yang kerap dimanfaatkan sebagai alat untuk merebut kekuasaan politik dan ekonomi di tanah air, masih kontemporer untuk dibicarakan. Setidaknya, pernyataan ini dilandasi dua argumen mendasar, yakni: (1) setiap

pemilihan pemimpin seperti pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), isu tentang asal etnis (geopolitik) kandidat tidak lepas dari kerangka “pertarungan politik” antar kandidat; (2) penguasaan dan akses terhadap aset-aset ekonomi tertentu oleh entitas sosial tertentu (baca: etnis), tidak pernah lepas dari bahan

pembicaraan berbagai kalangan. Secara sosiologis, gejala sosial (fakta sosial) seperti ini mengundang pertanyaan substantif perihal apakah kenyataan ini hadir begitu saja ataukah sebuah gejala yang berhistori?

Merujuk kasus Sulsel (khususnya etnis Bugis dan Makassar) sebagai lokasi studi, menunjukkan bahwa pertarungan elit, baik pada ranah politik maupun ekonomi antar etnis tidak lepas dari dimensi histori. Meski demikian, persaingan yang kemudian berwujud dalam pertarungan politik maupun ekonomi tersebut memberikan gambaran bahwa pertarungan yang terjadi sepenuhnya dilakukan oleh lapisan atas (elit) antar etnis dalam menguasai sumberdaya tertentu.

Pertarungan para elit di dua etnis (Bugis dan Makassar) di Sulsel memperebutkan kekuasaan politik dan ekonomi cenderung berakhir dengan konflik, baik itu tertutup maupun terbuka. Konflik ini cenderung “laten” karena kedua kelompok etnis memiliki cara pandang yang tertutup, kontras dan mendalam, mengenai kulturnya masing-masing, terutama mengenai pemahaman kekuasaan.

Merunut sejarah, konflik terbuka antara etnis Bugis dengan Makassar dimulai pada abad 17, tepatnya pada 1667, ketika Sultan Hassanuddin (Sultan Gowa yang menguasai sebagian besar jazirah Sulsel) ditantang oleh Arung Palakka (raja Bone yang menjadi simbol dan representasi etnis Bugis). Arung Palakka yang mendapat dukungan kuat dari Belanda, berhasil menggulingkan kekuasaan Sultan Hasanuddin. Sejak “kekalahan” itu, etnis Makassar mengalami penurunan peranan politik dan ekonomi, sebaliknya etnis Bugis menjadi pengendali kekuasaan di Sulsel.

Beberapa cacatan penting untuk melihat konflik elit etnis Bugis dan etnis Makassar dapat diurai dengan memotret karakter elit yang memanggul kekuasaan politik dan ekonomi. Dari sini terlihat dengan jelas bagaimana elit Bugis dan Makassar memainkan pola kekuasaan yang bersifat tradisional, bernuansa Islam dan praktek kekuasaan modern untuk menapaki posisi politik dan ekonomi mereka. Atau memodifikasi tiga pola kekuasaan tersebut sekaligus. Selain itu, terdapat juga bentuk dan jenis kekuasaan yang dimainkan para elit Bugis dan Makassar, yakni kekuasaan yang bersifat tersembunyi dan tersediakan (terberikan).

Dari jenis-jenis kekuasaan ini, kemudian terbentuk sistem sosial yang sangat mempengaruhi pola hubungan antara elit sebagai penguasa dengan pengikutnya. Tentang hal ini, konsep hubungan elit dengan pengikutnya yang paling menonjol di dalam etnis Bugis dan Makassar adalah konsep *Ajjoareng*¹ dan *Joa*² yang dikenal oleh tradisi Bugis, atau *Karaeng* dan *Taunna* yang dikenal oleh etnis Makassar. Secara sosiologis konsep ini merupakan nama

¹*Ajjoa'raeng* adalah orang yang menjadi ikatan atau panutan dan ini bisa seorang *punggawa*, *aru* ataupun pemuka masyarakat lainnya. Pendeknya dia merupakan tokoh pemimpin, yang menjadi sumbu kegiatan orang-orang disekitarnya, yang mengikuti kemauan serta kehendaknya dengan patuh.

²*Joa'* adalah pengikut *Ajjoa'raeng* yang berasal dari golongan maradeka (orang merdeka) yang setia.

lain dari hubungan *patron-client* yang umumnya berlaku pada masyarakat pedesaan di Indonesia. Meski demikian, untuk kasus Sulsel, ketundukkan *joa'* atau *taunna* (klien) kepada *ajjoareng* atau *karaeng* (patron) merupakan penjelmaan nilai *siri'* yang berlaku pada dua entitas sosial tersebut³. Dengan demikian, *siri'* tidak sekedar simbol nilai yang berlaku pada lapisan tertentu, melainkan sebagai faktor penting untuk mendorong terjadinya mobilisasi antar lapisan sosial yang ada dalam dua etnis tersebut.

Selanjutnya pada arena politik maupun ekonomi, ikatan patron-klien pada dua etnis ini dapat dimaknai sebagai modal sosial (*social capital*) yang dapat digunakan oleh elit untuk mempertahankan kekuasaan politik maupun ekonominya. Hal lain yang tak kalah menariknya adalah kepemimpinan kaum elit (*ajjoareng* atau *karaeng*) menjaga solidaritas massa (*joa'* atau *taunna*) melalui kharismanya. Kharisma yang dimaksud adalah kemampuan elit menjaga ideologi atau mitos sebagai *shared value system* yang memungkinkan elit dan massa berkomunikasi satu sama lain serta untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan (Pareto, Mosca, dan Michels dalam Pelras, 2006). Tentang hal ini, asumsi yang dapat dikembangkan adalah pemaknaan atas ideologi atau mitos dapat dijadikan sebagai kekuatan elit dalam konteks pertarungan untuk mencapai kekuasaannya.

Pola Kekuasaan antara Etnis Bugis dan Makassar

Beberapa penelitian dan tulisan mengenai topik ini (elit; kepemimpinan dan struktur kekuasaan di dalam etnis Bugis dan Makassar), paling kurang telah dieksplorasi oleh beberapa penulis dan ilmuan antara lain; Pola hubungan elit etnis Bugis dan Makassar dan pengikutnya digambarkan dengan jelas oleh Kooreman (1883), Mattulada (tt), dan Christian Pelras (2000). Menurut mereka, hubungan elit Bugis dan Makassar dengan pengikutnya disebut dengan istilah hubungan patron-klien, dengan menggunakan konsep *Ajjoareng* dan *joa'*. *Ajjoa'raeng* menurut mereka adalah orang yang menjadi ikatan atau panutan dan ini bisa seorang *punggawa*, *aru* ataupun pemuka masyarakat lainnya. Pendeknya dia merupakan tokoh pemimpin atau elit, yang menjadi sumbu sosial, politik dan ekonomi bagi para pengikutnya. Para pengikutnya, harus tunduk dan patuh pada kemauan *ajjoarengnya*. Pengikut-pengikut ini dikenal dengan sebutan *joa'* dan mereka berasal dari golongan maradeka (orang merdeka) yang setia.

Sedangkan study tentang struktur kekuasaan dan politik di Sulsel antara lain dilakukan Ijzereef (1987) dan Millar (1992). Untuk melihat hal ini lebih jauh kita kembali dulu melihat ke masa lalu. Kajian tentang struktur kekuasaan dan politik di kerajaan Bone di pertengahan abad ke 19 hingga pertengahan abad 20 bisa menjadi model yang menunjukkan kepada kita bagaimana kekuasaan bekerja di daerah ini. Menurut Ijzereef (1987),

³Hubungan *minawang* (kepengikutan) ini antara patron dan klien lebih bersifat sukarela. Untuk itu, hubungan mereka sangat erat. Mereka saling membela dan melindungi jika salah satu pihak mendapat kesulitan atau bahaya. Sebagai misal, penghinaan terhadap pengikut seorang *karaeng* akan dipandang juga sebagai penghinaan dari *karaeng* itu sendiri.

masyarakat Sulsel adalah masyarakat yang sangat hierarkis, yang tersusun berdasarkan 'kemurnian darah' kebangsawanan. Hierarki ini tentu tidak berdiri sendiri, dimana setiap unit kekuasaan punya hierarki dan unit kekuasaan ini sendiri berada di dalam hierarki yang lebih besar, hingga tingkat antarkerajaan. Menurutnya, semakin berdekatan posisi dua pihak dalam suatu hierarki maka potensi konfliknya semakin besar. Millar (1992), lebih banyak mengurai dan menggambarkan konsep pelapisan sosial. Dia secara spesifik mengurai konsep 'lokasi sosial' yang terpampang jelas ketika masyarakat Bugis mengadakan pesta pernikahan. Lokasi tempat seseorang duduk secara fisik selama prosesi tertentu sebuah pernikahan menunjukkan posisi dalam hierarki sosialnya.

Sebagaimana penelitian Millar dan Pelras (2000) juga menekankan pentingnya hubungan patron-klien yang dalam hal ini diwakili hubungan 'Joa' dan 'Ajoareng' atau 'Punggawa' dan 'Sawi'. Hubungan ini, menurut Pelras adalah hubungan yang tidak terlalu timpang. Para patron memang punya kekuasaan menentukan banyak hal bagi kliennya namun mereka juga mempunyai banyak kewajiban terhadap mereka, termasuk memberi jaminan finansial ketika *shock* dalam berbagai bentuk menghantam sang klien. Apabila patron tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, maka klien bisa dengan bebas berpindah ke patron lain.

Caldwell (1999;2005), yang menganalisis beberapa naskah silsilah Bugis dan Makassar berkesimpulan bahwa secara tekstual genealogi kerajaan Bugis (Soppeng Barat) merujuk pada penguasa yang hidup lebih awal daripada penguasa Luwu. Setidaknya ini menunjukkan adanya kekuatan yang muncul nyaris bersamaan di jazirah ini. Unit-unit politik ini setidaknya muncul mulai pada abad ke 12 dan 13. Sementara pada etnis Makassar, Cummings (2002), mengakui Gowa sebagai awal dari asal-usul para penguasa di kawasan Makassar.

Bagaimana proses terbentuknya kelompok elit dan bagaimana cara etnis Bugis dan Makassar mengelola dan mempertahankan kekuasaannya? Caldwell (2004), berpendapat bahwa penguasaan terhadap sumberdaya alam seperti sawah yang subur, membuat seorang penguasa bisa mengkonsolidasi kekuatannya. Baginya, ideologi dan religi adalah faktor sekunder dari terbentuknya sebuah kekuasaan yang dipegang oleh segelintir elit. Sementara Gibson (2005; 2007), menuliskan bahwa cara masyarakat Makassar mempertahankan kekuasaannya adalah dengan mengaktifkan sebanyak mungkin pengetahuan simbolik yang dipercaya masyarakat. Lewat mitos dan ritual, para elit merelegitimasi dan mereproduksi kekuasaan mereka.

Ketika Sulsel benar-benar berada di bawah kekuasaan langsung pemerintah kolonial, model kekuasaan tradisional dan Islam tidak hilang dengan sendirinya. Menurut Gibson (2005), mereka hidup berdampingan hingga sekarang. Dalam hal ini dia membantah tesis Weber bahwa ketiga model relasi kekuasaan ini merupakan sebuah proses sejarah dengan model kekuasaan rasional-legal sebagai titik akhirnya.

Pola kekuasaan baru di Bugis dan Makassar diawali dengan hadirnya Muhammadiyah (1937). Pada awal 1937, Muhammadiyah telah mempunyai enam belas cabang di Sulsel. Dan pada tahun 1941, ketika invasi Jepang di mulai di Nusantara, Muhammadiyah menyatakan telah mempunyai 7.000 anggota dan 30.000 simpatisan di Sulsel. Inilah organ Islam paling besar di Sulsel pada masa itu. Kehadiran organisasi Islam ini menurut Gibson (2005), relatif mempengaruhi perubahan peta kekuasaan di Sulsel. Ini dibuktikan dengan mulainya sejumlah orang biasa (bukan bangsawan) bisa mendapatkan posisi tinggi secara politis maupun ekonomi. Namun peran ini menurut Millar (1989) belum terlalu kuat mengubah peta kekuasaan di Sulsel, bahkan menjadi kurang relevan lagi, sehingga nilai penting organisasinya pun menjadi surut.

Akhirnya Millar (1989) menyimpulkan bahwa, selama dekade 1970-an, terjadi peralihan gagasan tentang status di wilayah Bugis. Sifat dan pencapaian pribadi sudah menjadi faktor yang lebih penting dalam melihat kualitas seseorang ketimbang di masa sebelumnya. Karena kalangan nonbangsawan pada masa itu tidak kekurangan peluang untuk melakukan mobilisasi sosial, maka ketegangan dan persaingan memperebutkan pengaruh di antara *tau matoa*, lebih spesifik lagi, antara *tau matoa* bangsawan atau dan *tau matoa* orang kebanyakan, tetap berlangsung sengit. Pergeseran status di dalam etnis Bugis berlangsung lebih cepat pada sektor ekonomi, akan tetapi sangat lamban terjadi pada kekuasaan politik. Hal yang nampak berbeda terjadi di dalam etnis Makassar, pergeseran status kekuasaan politik dan ekonomi berlangsung lebih terbuka dan dinamis, dibandingkan dengan etnis Bugis.

Proses Pembentukan Elit Kekuasaan pada Etnis Bugis dan Makassar

Masyarakat Sulsel, terutama etnis Bugis dan Makassar yang tersebar di pesisir pantai dan mendiami daerah pedalaman, pegunungan dan hulu sungai diikat dalam kelompok-kelompok anak suku yang masing-masing berdiri atas dasar kekerabatan sebagai dasar kebersamaannya. Kelompok-kelompok anak suku ini dipimpin oleh seorang yang bergelar *karaeng*, *puang*, atau *matoa*. Sebagai seorang pemimpin, ia diwajibkan memiliki kemampuan untuk memberi perlindungan kepada pengikut-pengikutnya. Sebaliknya, pada saat yang sama, para pengikut juga menunaikan kewajiban dalam bentuk ketaatan dan kesetiaan dari mereka terhadap segala peraturan dan tradisi yang telah disepakati oleh pemimpin dan pengikutnya.

Sebagian besar penduduk pedesaan pada etnis Bugis dan Makassar (terutama bagi mereka yang tinggal di pedesaan pedalaman yang masih memegang tradisi), berkeyakinan bahwa para *karaeng*, *puang* atau *matoa* adalah mereka yang memiliki ornamen yang disebut *kalompoang* atau *gaukang*. *Gaukang* atau *kalompoang* ini adalah *karaeng* yang sebenarnya karena memiliki tanah, sedang seorang *karaeng* tidak lain hanya pengganti atau penjagagaukang. Oleh karena itu, ia berhak memanfaatkan apa yang dimiliki oleh *gaukang*. Antara benda *gaukang* dan kedudukan seseorang *karaeng* tidak dapat dipisahkan, kedua-duanya

merupakan kesatuan. Di mana disimpan *gaukang*, di situ pula *karaeng* bertempat tinggal. Bahkan, tempat ditemukannya *gaukang* ini dikaitkan pula dengan awal munculnya pemukiman pertama yang cocok untuk manusia.

Pada hampir semua anak suku mengenal dan memiliki wilayah teritorial, yaitu *gelarang*, *bori*, atau *wanua* yang sifatnya sangat tertutup bagi anak suku yang lain. Di samping itu, sudah digunakan pula panji-panji berupa bendera sebagai lambang persatuan dan kemerdekaan. Hanya saja adanya semangat ekspansif dari setiap anak suku dalam usahanya merebut lahan yang subur dan tempat yang strategis menyebabkan keadaan selalu siap perang.

Usaha untuk mengatasi keadaan kacau-balau pernah dilakukan oleh suku Makassar dengan cara menggabungkan diri dalam bentuk persekutuan. Beberapa orang pemimpin anak suku pemilik *gaukang* bersepakat untuk menjalin persahabatan, saling menghormati hak-hak, dan tolong-menolong. Melalui jalinan kerja sama itu, akhirnya tercipta suatu lembaga sosial kuno yang mereka sebut "*Kasuwiang Salapang*" artinya 'Sembilan Pengabdian'. Selanjutnya, mereka mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai pemimpin persekutuan yang diberi gelar *paccalaya*. Untuk masa selanjutnya, jabatan *paccalaya* dipegang secara bergiliran di antara penguasa wilayah yang menggabungkan diri itu. Itu sebabnya tempat kedudukan *paccalaya* yang permanen tidak ditemukan dalam sejarah.

Seorang penguasa wilayah yang telah diangkat menjadi pemimpin persekutuan hanya berhak mengatur wilayahnya, sedangkan kedelapan wilayah yang lain tetap berdiri sendiri dan penguasanya bebas mengatur pemerintahannya masing-masing tanpa dicampuri oleh *paccalaya*. Satu-satunya kewajiban mereka adalah memberikan upeti kepada *paccalaya* dalam bentuk natura yang dihasilkan daerahnya masing-masing sebagai tanda *kasuwiang*.

Tomanurung sebagai Simbolisasi Kekuasaan

Ketidakmampuan *paccalaya* mengendalikan pemerintahan dan timbulnya rasa tidak senang dipimpin oleh kalangan anggota persekutuan yang kurang lebih setaraf menyebabkan pemerintahan gabungan itu runtuh dan keadaan kembali menjadi kacau. Adanya kebutuhan yang sama untuk mencari dan mengangkat seorang pemimpin, yang mampu mempersatukan semua kelompok ke dalam suatu persekutuan yang lebih besar dan luas, menyebabkan dibuatnya konsep "*tomanurung*". *Tomanurung* ialah suatu konsep yang mengabsahkan kedudukan raja bagi terbentuknya kerajaan, sekaligus memberikan supremasi bagi raja dan keturunannya kemudian sebagai manusia dewa yang menduduki lapisan teratas dalam kehidupan sosial masyarakat.

Tomanurung sebagai suatu konsep yang melegitimasi kedudukan seseorang untuk menjadi raja, sekaligus menjustifikasi komunitasnya menjadi kerajaan adalah seseorang yang dianggap turun dari langit, yang memiliki kemampuan mumpuni. Tentu saja "penciptaan simbol" kedudukan seseorang yang mendapat legitimasi

orang banyak ini, tidaklah dilakukan oleh segelintir orang, melainkan dilakukan oleh sejumlah elit yang memiliki tujuan kekuasaan yang sama. Di negeri orang Makassar, *tomanurung* itu adalah seorang perempuan. Sebelum diangkat menjadi raja, dibuatlah perjanjian antara sembilan penguasa wilayah yang telah ada dengan calon raja tersebut. Inti dari perjanjian tersebut berbunyi, "Mereka akan menjadikan *tomanurung* sebagai raja yang akan mereka taati bersama, tetapi kekuasaan dan kepemimpinan atas wilayah yang telah ada tetap berada di tangan sembilan penguasa wilayah".

Tomanurung sebagai pendatang baru dalam kancah kekuasaan orang-orang Makassar, tidak serta merta memiliki otoritas yang luas. *Tomanurung* tidak memiliki kewenangan mencampuri urusan pemerintahan yang berada dalam wilayah *Bate Salapang*. Kecuali terjadi penambahan wilayah baru kerajaan yang tidak termasuk wilayah *Bate Salapang* dapat diperintah oleh keturunan *tomanurung*, termasuk semua jabatan. Jabatan penting yang ada di pusat kerajaan dengan menggunakan gelar *anak karaeng ri Gowa*. Adapun penguasa wilayah-wilayah yang termasuk dalam wilayah *Bate Salapang* diberi gelar *daengta ri Gowa*. Dengan demikian, masalah pelapisan masyarakat, termasuk struktur kepemimpinan secara keseluruhan masih dapat diidentifikasi. Semua jabatan kerajaan yang pemangkunya bergelar *karaengta* adalah keturunan *tomanurung*, sementara yang bergelar *daengta* adalah jabatan yang pejabatnya berasal dari keturunan pemimpin-pemimpin wilayah asal mula kerajaan.

Proses penciptaan simbol elit kekuasaan pada etnis Bugis (dalam studi ini diwakili oleh kabupaten Bone), memiliki argumentasi yang hampir sama dengan etnis Makassar. Para elit, seperti halnya yang terjadi di negeri orang Makassar, negeri orang Bugis Bone pun pada mulanya ditandai dengan adanya sifat permusuhan yang berkepanjangan antara kelompok anak suku. Untuk mengatasi keadaan itu, tujuh di antara sekian banyak kelompok anak suku bersepakat untuk menyatukan diri dalam rangka membendung serangan dari kelompok lain. Bila salah satu anggota persekutuan mendapat serangan, keenam anggota yang lain berkewajiban membantu dan melindungi. Persekutuan ini dalam sejarah dikenal dengan sebutan *Kawerrang Tanah Bone* 'Ikatan Tanah Bone'. Tidak seperti di Makassar, persekutuan di Bone semata-mata mempertahankan diri dan tidak bermaksud mengangkat seorang pemimpin persekutuan seperti *paccalaya*. Masing-masing kelompok tetap dipimpin oleh *matoa* dan berhak penuh mengatur wilayahnya secara otonom sampai dengan masa datangnya *tomanurung*.

Pada saat *tomanurung* berkuasa di Bone, ia membiarkan sistem *kawerrang* terus berlangsung. Para *matoa* tetap bebas mengatur wilayahnya masing-masing. Satu-satunya yang terbentuk adalah dewan kerajaan yang disebut *Matoa Pitue*. Tugas *Matoa Pitue* antara lain adalah mengoordinasikan kelompok yang ingin menggabungkan diri dalam Kerajaan Bone. Menjelang abad ke-6 terjadi perubahan sangat mendasar yang dilakukan oleh seorang raja perempuan. Meskipun dalam sejarah hanya disinggung sepintas, tidak salah bila raja

ini disejajarkan dengan Mangkubumi Kerajaan Makassar yang tersohor, Karaeng Patingalloang, karena kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dijalankannya.

Ia berusaha mengintensifkan pemusatan kekuasaan dalam bentuk kesatuan Tanah Bone. Semua keturunan *tomanurung* diangkat dalam jabatan pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah-daerah terpencil. Sistem *kawerrang* (ikatan) ditiadakan dan diganti dengan *watampone* (kesatuan Bone). Ini menunjukkan adanya perubahan kepemimpinan dan kekuasaan pemerintahan dari sistem desentralisasi ke sentralisasi.

Ketujuh *Matoa Pitue*, yang tadinya memegang jabatan rangkap sebagai anggota dewan kerajaan dan penguasa-penguasa wilayah masing-masing secara otonom, ditarik ke pusat dan berperan sebagai pemerintah pusat. Semua wilayah mereka dan negeri lain yang telah menggabungkan diri berada di bawah kekuasaan seorang raja dengan sebutan *arung mangkau* “raja yang berdaulat”. Melalui jalan perkawinan, status mereka yang tadinya sebagai penguasa negeri berubah menjadi sanak keluarga raja yang dikenal dalam masyarakat sebagai lapisan *anakareng*. Dewan kerajaan *Matoa Pitue* pun diubah menjadi *Ade Pitue* yang bertugas mengatur semua tata krama dalam kerajaan.

Dalam sistem pemerintahan, jabatan tertinggi dipegang oleh raja. Raja dipilih oleh dewan *Ade Pitue* dengan persetujuan kaum bangsawan yang lain dan harus berasal dari kaum bangsawan berdarah murni, yaitu keturunan *tomanurung*. Meskipun secara teoretis mempunyai kedudukan yang tinggi, raja tidak dapat berbuat apa-apa tanpa bantuan pembesar kerajaan. Selain itu, raja juga tidak banyak tahu mengenai selukbeluk berbagai masalah dalam kerajaannya. Ini bukan berarti bahwa raja tersebut tidak memiliki peranan. Peranan raja tetap penting, namun tidak berkaitan dengan masalah kehidupan sehari-hari.

Untuk menjalankan roda pemerintahan, raja dibantu oleh dewan *Ade Pitue* dan seorang mangkubumi yang bergelar *tomanurung*. Seorang mangkubumi dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh dewan *Ade Pitue* dengan izin raja. Selain harus berasal dari kalangan bangsawan, salah satu dari nenek moyangnya juga harus pernah menduduki jabatan tersebut. Menurut adat yang berlaku, tidak seorang pun boleh menemui raja sebelum mendapat izin mangkubumi, termasuk raja atau utusan dari kerajaan lain. Tokoh inilah yang mengendalikan pemerintahan, mengeluarkan perintah atas nama raja, dan sekaligus bertindak sebagai ketua dewan *Ade Pitue* dan kerajaan-kerajaan taklukan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk pola kekuasaan dan kepemimpinankerajaan memperlihatkan perbedaan antara negeri orang Makassar dengan orang Bugis. Makassar menerima dan menempatkan *tomanurung* serta keturunannya kemudian hanya pada puncak kerajaan. Adapun negeri-negeri asal kerajaan tetap mempertahankan kepemimpinan asli dari zaman pra-*tomanurung*. Di negeri orang Bugis Bone, konsepsi kepemimpinan *tomanurung* telah diperlakukan secara intensif sehingga tercipta suatu lapisan

masyarakat penguasa yang sepenuhnya adalah keturunan *tomanurung*.

Elit Politik Bugis dan Makassar dalam Peralihan Sistem Politik

Pertarungan politik lokal dalam ranah demokrasi di Sulawesi [bagian] Selatan antara etnis Bugis dan etnis Makassar kembali mencuat di tahun 2007 lalu, antara calon gubernur yang dianggap sebagai tokoh yang mewakili etnis Makassar, yakni Syahrul Yasin Limpo [Orang Gowa] dengan tokoh dari etnis Bugis, yaitu Amin Syam [Orang Bone]. Dengan merujuk pada catatan sejarah atas dinamika politik di Sulsel, maka persetujuan ini adalah sebuah persaingan panjang yang sudah berlangsung beberapa abad lampau. Bila mengacu pada konflik besar di abad ke-17 antara kerajaan Gowa-Tallo [mewakili etnis Makassar dan umumnya dikenal sebagai Kerajaan Makassar] yang didukung oleh beberapa kerajaan di jazirah Sulawesi dengan Kerajaan Bone [etnis Bugis] yang didukung penuh oleh serdadu VOC, maka persetujuan politik ini memang telah lama dan masih terus membekas pada individu dari kedua etnis, khususnya mereka yang bergelut dalam dunia politik dan menjadikan ‘etnis’ sebagai salah satu alat politik untuk meraih kekuasaan.

Persetujuan itu, pada akhirnya dimenangkan oleh Syahrul Yasin Limpo (yang berpasangan dengan Agus Arifin Nu'man-representasi dari etnis Bugis) dengan perolehan suara sebesar 1.432.572. Besaran pemilih ini hanya selisih sekitar 30.000-an suara dari total yang telah diraih oleh Amin Syam (berpasangan dengan Mansyur Ramli—representasi orang Bugis-Luwu) sebesar 1.404.910 suara dan Pasangan Azis Qahhar Mudzakkar-Mubyl Handaling (lebih mewakili etnis Luwu) memperoleh 786.792 suara. Sebelumnya, penguasa politik di Sulsel sejak kemerdekaan memang didominasi oleh politisi atau tokoh beretnis Bugis.

Mengacu pada kasus-kasus kompetisi elit di Sulsel, terutama yang terjadi sepanjang era pasca kemerdekaan hingga orde reformasi saat sekarang ini, nampak bahwa keseimbangan posisi elit antara etnis Bugis dan etnis Makassar menjadi penentulahirnya elit-elit baru di Sulsel. Kemenangan pasangan Syahrul Yasin Limpo (etnis Makassar) yang berpasangan dengan Agus Arifin Nu'mang (etnis Bugis) pada Pilkada Sulsel 2007, menjelaskan betapa model “politik cangkokan” (*hybrid politics model*) etnik sangat dibutuhkan dalam memperebutkan panggung kekuasaan di Sulsel. Efek dari politik cangkokan etnisitas ini kemudian dilebarkan kearah usaha para elit untuk melakukan manipulasi teritorial, untuk memperoleh dukungan geo-politik. Berkaitan dengan konsep manipulasi teritorial ini, di Sulsel dikenal dengan wilayah-wilayah politik berbasis etnik seperti: (i) Bosowa (Bone, Soppeng, Wajo), daerah yang mengidentifikasi diri sebagai wilayah inti bagi etnis Bugis; (ii) Ajataparang (Barru, Pare-pare, Sidrap, Pinrang dan Enrekang), daerah-daerah ini secara geografis dan kultural masih dalam wilayah etnis Bugis, akan tetapi spirit ke-Bugis-an mereka agak berbeda dengan spirit ke-Bugis-an wilayah Bosowa; (iii) Luwu Raya (Luwu, Palopo, Luwu Utara dan Luwu Timur), meskipun dikenal sebagai etnis Bugis, akan tetapi hamparan wilayah Luwu Raya memiliki spesifikasi

kultur dan struktur sosial politik yang cukup berbeda dengan etnis Bugis lainnya; (iv) Makassar (Gowa, Takallar, Jeneponto, Bantaeng dan Selayar), daerah-daerah ini sangat vulgar memosisikan dirinya sebagai etnis Makassar, baik secara kultural maupun sosial politik; (v) Campuran (kota Makassar, Maros, Pangkep, Bulukumba dan Sinjai), daerah-daerah ini ditempati oleh dua etnis utama, Bugis dan Makassar. Hal ini dapat dilihat pada budaya dan bahasa mereka; (vi) Toraja (Toraja dan Toraja Utara), wilayah ini dikenal sebagai etnis Toraja. Etnis Toraja secara politik, kebudayaan, agama dan bahasa, sangat berbeda dengan etnis Bugis dan Makassar.

Pertarungan Elit Lokal

Beberapa elit lokal yang aktif di kota Makassar terus menggeliat mendorong kemerdekaan wilayah mereka dari penjajahan Belanda. Wacana anti-kolonial sudah merasuki mereka dan terlibat dalam pusaran gerakan politik secara luas di seluruh Indonesia. Salah satu nama yang sangat dikenal adalah Najamuddin Daeng Malewa, seorang intelektual Makassar yang mendirikan Partai Sarekat Celebes dan diangkat sebagai Walikota Makassar oleh pemerintah Jepang. Dalam situasi yang baru ini, sebagaimana dipaparkan oleh Millar, para bangsawan senior baik dari Gowa maupun Makassar memanfaatkan keterlibatan politik yang dikendalikan oleh Jepang untuk mengangkat kembali kedudukan lama mereka dan memulai hubungan baru dengan para politisi nasionalis. Saat itu, Jepang mendirikan dewan pemerintahan se-Sulsel untuk pertama kalinya tahun 1944. Hubungan ini semakin menguat saat keterlibatan intelektual Minahasa Dr. G.S. Ratulangie dan intelektual Bugis – Banjar Tadjuddin Noor (Millar 2009:66-67, lihat juga Magenda; Harvey 1974:120).

Dalam perjalanannya, orientasi politik dua politisi besar Sulawesi ini, Daeng Malewa dan Ratulangie mengalami ‘perpecahan’ saat gerakan politik semakin meluas hingga ke tingkat nasional, terutama sejak Ratulangie mendirikan SUDARA (Sumber Darah Rakyat)⁴ dan menempatkan Najamuddin Daeng Malewa dalam posisi yang kurang strategis sebagai sekedar pengurus Majelis Pendidikan Pusat dan tidak masuknya Malewa sebagai tim Badan Pekerja Untuk Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang kemudian berganti PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 7 Agustus 1945 yang dikirim ke Jakarta. Di antara yang diutus adalah Andi Mappanyukki (karena berhalangan hadir maka ia digantikan oleh Andi Pangerang Pettarani), DR. G.S.S.J. Ratulangie, A. Sultan Daeng Raja dan Sekr. Mr. A. Zainal Abidin (lihat Ide Anak Agung Gde Agung, 1985: 49-50).

⁴SUDARA dalam bahasa Jepang adalah *ken koku dosikai*. Wadah ini dipimpin oleh Lanto Daeng Pasewang, Andi Mappanyukki dan Mr. Tadjuddin Noor. Wadah ini berkembang pesat, meliputi seluruh potensi perjuangan di Sulsel, serta merupakan mantel organisasi binaan tokoh – tokoh pemuda antara lain : Andi Mattalatta, Saleh Lahode, Amiruddin Mukhlis, Manai Sophian Sunari, Sutan M. Yusuf SA, Man, Y. Siranamual, dll.

Persetujuan dua tokoh besar ini berimplikasi pada afiliasi bangsawan dari kedua etnis besar, Bugis dan Makassar. Para Bangsawan Bugis mengikuti garis perjuangan Ratulangie dalam arti segaris dengan politisi Jakarta seperti Soekarno, sementara para bangsawan Makassar lebih memilih mengikuti alur pemikiran politik Daeng Malewa. Dalam catatan Ijzereef menyebutkan bahwa SUDARA yang didirikan tersebut meluas ke seluruh daerah dalam bentuk-bentuk komite-komite perjuangan (*comite van actie*). Nadjamuddin Daeng Malewa seorang nasionalis yang memperjuangkan kepentingan lokal yang mempunyai pengaruh luas sempat bekerjasama dengan Ratulangi dan termasuk pengurus di dalamnya. Tapi kerjasama itu tidaklah begitu baik. Ratulangi dan Tadjuddin Noor berada dalam persaingan, sedang kesetiaan Nadjamuddin diragukan (Willem Ijzeeref, 1984). Terdapat kemungkinan, Nadjamuddin yang merasa dirinya mempunyai kemampuan dan banyak berjasa terhadap pergerakan nasional di Sulsel, ternyata ditempatkan pada posisi tak terlalu penting dalam SUDARA yang baru dibentuk oleh Ratulangi tersebut.

Persaingan dua tokoh ini terus menguat paska kemerdekaan RI. Setelah pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945, Soekarno mengangkat Ratulangie sebagai gubernur Sulawesi. Sebuah keputusan politik yang menimbulkan ketegangan di kalangan elit lokal baik bangsawan maupun dari kalangan non-bangsawan terdidik. Namun berkat dukungan aktif Andi Mappanyukki, mayoritas bangsawan Sulsel pada akhirnya mendukung Ratulangie melalui “Deklarasi Djongaya” 15 Oktober 1945 (IAAGA, 1985:56). Dalam perjalanannya sebagai gubernur Sulawesi, Ratulangie kemudian mendirikan sebuah badan yang kemudian dianggap menjadi kendaraan pemerintah provinsi Sulawesi, yakni Pusat Keselamatan Rakyat Sulawesi (PKR) dengan tidak memberikan kedudukan yang penting untuk Tadjuddin Noor yang sejak awal setia mendampingi. Sedangkan Nadjamuddin Daeng Malewa sama sekali tidak masuk dalam kepengurusan itu. Dalam waktu yang bersamaan Tadjuddin Noor mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) di Sulawesi sekaligus menjadi ketua partai itu. Sementara itu, Daeng Malewa tetap dengan Partai Sarekat Selebes dan terus menggelorakan kepentingan lokal.

Dinamika politik lokal masih terus berlangsung. Memasuki tahun 1950, Kahar Muzakkar, seorang gerilyawan nasionalis menemukan diri kecewa setelah idenya untuk meleburkan diri dan seluruh anggota kesatuannya ke dalam kesatuan tentara RI ditolak oleh pemerintah RI yang berkedudukan di Jakarta. Seiring dengan itu, sebagai seorang Islam dengan latar belakang pendidikan Muhammadiyah, pada tahun 1953 ia bergabung dengan ide besar yang diusung S.M. Kartosuwiryo yakni mendirikan Negara Islam Indonesia dan bergabung dengan kelompok militernya yang dikenal dengan nama Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Sejak itu, gerilyawan Kahar Muzakkar merebut kendali atas sebagian besar daerah pedalaman Sulsel. Dukungan rakyat atas perjuangan Kahar Muzakkar menegakkan *siri*’ diberikan secara luas. Sementara itu, karena karakter pribadinya yang anti feodal, membuat banyak bangsawan baik muda maupun profesional di kemiliteran bergabung dengan tentara Jawa

yang ditugaskan untuk menumpas perjuangan Kahar Muzakkar. Namun, dominasi Kahar bertahan hingga tahun 1965. Beberapa faktor dominasi itu menurut Harvey (dalam Millar, 2009:70) terletak pada beberapa hal, diantaranya tentara Jawa yang menganut 'sinkretis', para pemimpin perang Bugis (*Bugineseswarlords*) yang disegani di pedalaman, taktik tekanan yang diterapkan tentara Indonesia, bantuan kaum bangsawan yang takut hartanya diambil dan keluarganya terancam, dan sikap militer yang tidak benar-benar hendak menumpas pemberontakan karena persoalan persaingan dalam perebutan posisi militer dengan gerilyawan, dan bila Sulsel damai maka jumlah pasukan akan dikurangi (Harvey 1974:260-271). Selain itu, kekuatan militer Kahar Muzakkar juga memperoleh amunisi baru setelah pasukan PRRI/Permesta dari Sulawesi Utara bergabung dengannya pada tahun 1962.

Rupanya, pihak Jakarta di bawah kendali Soekarno juga masih terus menggelorakan semangat anti feodalisme. Hal ini terlihat dari kebijakan pemerintahan daerah yang ia terapkan dengan mengganti sistem swapraja menjadi swatantra di tahun 1957. Saat itu, kerajaan-kerajaan otonom berdiri atau dilebur sebagai sebuah kesatuan pemerintahan kabupaten. Raja-raja terakhir dinobatkan sebagai bupati seperti Andi Mappanyukki di Bone dan Somba Andi Ijo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang di Gowa. Kebijakan ini untuk kabupaten Bone tertuang dalam Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Bone dan Pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo, dan Daerah Soppeng.

Dari aspek pemerintahan, tahun 1970-an Soeharto mengeluarkan kebijakan pemerintahan daerah dan desa yang bercorak sentralistik. Dalam kebijakan ini, posisi elit pemerintahan di level provinsi (Daerah Tingkat I) dan kabupaten (Daerah Tingkat II) ditentukan oleh Jakarta. Setiap daerah dari kedua level di atas mengajukan tiga sampai lima calon kepala daerah dan akan ditentukan oleh Presiden untuk disahkan Menteri Dalam Negeri (UU No. 5 tahun 1974). Pada masa ini, politisi dengan basis kemiliteran dan loyal kepada Soeharto akan dengan mudah mengakses kekuasaan dan menaiki tangga elit politik. Pada periode ini di tiga level pemerintahan (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) dominasi kepala daerah dari kalangan militer lebih besar ketimbang politisi sipil. Di Sulsel, gubernur berbasis militer adalah Achmad Lamo (1966-1978), Andi Odang (1978-1983), Zainal Basri Palaguna (1993-2003). Terkecuali Achmad Amiruddin (1983-1993) dari kalangan birokrat sipil (kalangan terdidik).

Demikian pula beberapa daerah tingkat II di provinsi Sulsel menunjukkan dominasi militer itu. Lihat saja di Kabupaten Bone yang didominasi oleh politisi militer seperti Kolonel H. Suaib (18 Agustus 1970-13 Juli 1977), Kolonel H. P.B. Harahap (13 Juli 1977-22 Februari 1982), Kolonel H. A. Made Alie (22 Februari 1982-6 April 1982), Kolonel H. Andi Syamsul Alam (28 Maret 1983-06 April 1988), Kolonel H. Andi Sjamsul Alam (6 April 1988-17 April 1993), Kolonel H. Andi Amir (17 April 1993-2003), Idris Galigo (2004-2014). Hal yang sama terjadi di kabupaten Gowa; Kolonel TNI A. Tau (1961-1966), Kolonel TNI Yasin Limpo (1966-

1967, pejabat Bupati), Kolonel TNI K.S. Mas'ud (1967-1977), Kolonel Polisi Sirajuddin (1977-1982), Kolonel TNI Kadir Dalle (1982-1987), Kolonel TNI Azis Umar (1987-1992), Syahrul Yasin Limpo (1992-2001), Abdullah Djabar (2002-2004) dan Ikhsan Yasin Limpo (2005-2015).

Meskipun kepemimpinan politik di Kabupaten Bone dan Gowa pada masa rejim Orde Baru sepenuhnya dikuasai oleh perwira menengah ABRI, akan tetapi ada yang spesifik antara Bupati dari ABRI di Kabupaten Bone dengan Bupati dari ABRI di Kabupaten Gowa. Dari enam Bupati dari ABRI di Kabupaten Bone, hanya Kolonel Harahap yang bukan orang etnis Bugis Bone. Sebaliknya, Bupati Gowa yang berasal dari ABRI, hanya satu orang yang berasal dari etnis Makassar Gowa, yakni kolonel A. Tau. Pilihan-pilihan ini tentu saja secara politik bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Intelejen politik Jakarta paling tidak memiliki pandangan bahwa kedua daerah ini memiliki karakteristik yang berbeda. Mungkin saja, Kabupaten Bone dipandang memiliki karakteristik masyarakat yang "tertutup" terutama dalam soal struktur kekuasaan, sebaliknya masyarakat kabupaten Gowa mungkin dinilai lebih flexibel menerima kepemimpinan dari "luar".

Kemunculan elit-elit Sulsel, terutama elit Bugis dan Makassar, dan khususnya elit Bone dan Gowa, sejak perang 1905 hingga periode reformasi (2010) proses kelahirannya dapat diklasifikasi melalui jalur; (i) Aristokrat (bangsawan dan pamong birokrasi pemerintahan kolonial); (ii) Aristokrat yang melakukan perlawanan terhadap Belanda dan kelompok pro kemerdekaan Indonesia, yang kemudian menjadi cikal bakal TNI; (iii) Kelompok ilmuwan atau cendekiawan; (iv) Kelompok pengusaha, terutama yang mendapat proteksi dari rejim Orde Lama dan Orde Baru.

Memasuki masa kemerdekaan, peranan elit aristokrasi yang berada di bawah kontrol Belanda mulai menurun. Elit-elit ini kebanyakan berada di istana Gowa. Sementara elit aristokrat lainnya, terutama yang berada di Bone semakin mendekati masa kemerdekaan, kian menjaga jarak dengan penguasa kolonial. Mereka intensif mengkonsolidasikan kekuatan untuk mempersiapkan diri memasuki era kemerdekaan. Disinilah letak perbedaan antara aristokrat Bone dengan aristokrat Gowa. Ketika aristokrat Bone mulai merambah dunia pendidikan dan membentuk laskar untuk melawan Belanda, aristokrat Gowa masih "berselimut" dengan pemerintahan kolonial di istana kerajaan Gowa. Akan tetapi di luar istana, kelompok kritis etnis Makassar yang "membangkang" terhadap kebijakan istana dan pemerintahan kolonial sudah mulai memasuki bangku pendidikan dan menyiapkan diri untuk mendukung Indonesia Merdeka. Kelompok ini kemudian menjelma menjadi kelompok cendekia dan laskar pembela kemerdekaan Indonesia.

Menilik preferensi politik Presiden Soekarno di Sulawesi, periode politik antara 1945 sampai 1956, menunjukkan kecenderungan politik yang mengarah pada upaya pemerintah pusat untuk menentukan pemimpin daerah adalah dari kalangan cendekiawan atau ilmuwan. Ini dapat dilihat dari pilihan Jakarta terhadap

Gubernur Sulawesi; Dr. Ratulangi, R. Sudiro, A. Burhanuddin dan Lanto Dg Pasewang (1945-1956) mereka-mereka ini dikenal dan mencirikan dirinya sebagai seorang ilmuwan. Pilihan ini, sesuai dengan prinsip-prinsip Soekarno yang ingin memudahkan peranan aristokrasi dan feodalisme di Indonesia. Akan tetapi, ketika politik lokal di Sulsel mulai bergejolak, yang ditandai dengan mulai munculnya perlawanan Kahar Mudzakkar, yang memproklamkan DII/TII pada Agustus 1953, Soekarno mulai memunculkan pola politik baru untuk menentukan Gubernur di Sulawesi. Dengan tujuan untuk meredam pemberontakan Kahar Mudzakkar, Soekarno harus mencari figur yang disegani oleh masyarakat Sulawesi, terutama dari etnis Bugis dan Makassar. Dapat diduga, salah satu tujuan dipilihnya A. Petta Rani sebagai Gubernur Sulawesi periode 1956-1960 adalah untuk meredam pemberontakan Kahar Mudzakkar. Soekarno ingin meminjam kewibawaan A.P. Petta Rani untuk menundukkan semangat patriotisme Kahar dan pengikutnya. A.P. Petta Rani adalah seorang elit yang cendekia dari kalangan bangsawan tinggi, yang sekaligus mewakili dua etnis besar di Sulawesi; Bugis dan Makassar.

Pada periode 1960-1966, Soekarno mengangkat Mayjen A.A. Rivai dari etnis Bugis Polewali Mandar menjadi Gubernur Sulselra (Sulsel Tenggara). Pendekatan politik Jakarta terhadap Sulawesi berubah dari politik kultural menjadi politik struktural kekuasaan. Soekarno yang semula mengandalkan kekuatan sipil mulai meminjam tangan tentara, paling tidak untuk tujuan meredam pemberontakan Kahar Mudzakkar. Pada periode ini, kekuatan Kahar terus merosot, bahkan pemberontakan Kahar dinyatakan berakhir, setelah ia tertembak mati pada Operasi Tumpas yang dilancarkan oleh Kodam XIV Hasanuddin berhasil mendesak pasukan DI/TII hingga akhirnya pimpinannya, Kahar Mudzakkar tertembak mati di dekat Sungai Lasolo Kolaka pada tahun 1965 (Harvey, 1987: 328; Gonggong, 1992: 174).

Memasuki Orde Baru, peranan militer semakin kuat. Rejim Soeharto menjadikan tentara sebagai ujung tombak kekuatan politiknya. Posisi-posisi strategis dikuasai oleh tentara. Gubernur Sulsel periode 1967-1978 juga diduduki oleh Mayor Jenderal TNI Achmad Lamo. Lamo adalah salah satu tentara yang berasal dari Sulsel yang memiliki hubungan kuat dengan Jakarta. Untuk menancapkan kekuatan politiknya lebih jauh di Sulsel, Soeharto kemudian memilih Brigader Jenderal A. Oddang sebagai Gubernur Sulsel pada kurun waktu 1978-1983. A. Oddang bukan saja tentara yang loyal pada atasannya di Jakarta, tetapi ia juga memiliki kewibawaan yang besar di Sulsel, karena dia adalah bangsawan kerajaan kembar Gowa-Tallo, tetapi memiliki peranan dan posisi penting di Bugis Ajatappareng.

Untuk tujuan peningkatan kualitas pembangunan di Sulsel, rejim Orde Baru melakukan eksperimen politik yang cukup radikal, yaitu mengangkat orang sipil, Prof. Dr. Ahmad Amiruddin yang berasal dari kampus menjadi Gubernur Sulsel selama dua periode (1983-1993). Mantan Rektor Universitas Hasanuddin dua periode ini membuktikan kepada Soeharto bahwa orang sipil bisa dipercaya memimpin daerah. A. Amiruddin

tampil sebagai Gubernur yang membanggakan di kancah nasional dengan konsep utamanya; Tri konsep (perubahan pola pikir, petik olah jual, dan pengwilayahan komoditas). Secara konsepsional, konsep yang diusung A. Amiruddin menjadi konsep dasar pembangunan Sulsel bagi para Gubernur berikutnya. Pada periode 1993-2003, jabatan Gubernur Sulsel kembali diduduki oleh tentara, yaitu Mayor Jenderal HZB. Palaguna. Pada masa periode kedua jabatan HZB. Palaguna, rejim Soeharto mengalami kemerosotan kepercayaan publik, akhirnya pada tahun 1998, Soeharto secara resmi mengundurkan diri. Situasi kepemimpinan nasional dan daerah mulai tidak stabil. Demonstrasi mahasiswa menuntut perubahan sistem politik terus meluas. Untuk merespon tuntutan itu, salah satunya, pemerintahan peralihan yang dipimpin Prof. Dr. BJ. Habibie mempercepat Pemilu. Hasilnya, dominasi Golkar sebagai partai yang paling berkuasa pada rejim Orde Baru mulai berkurang, dan muncul partai alternatif seperti Partai Demokrat, PKB dan PAN. Merosotnya kekuatan partai Golkar mengubah peta politik pada kancah nasional maupun daerah. Arena politik semakin terbuka. Politik bukan lagi milik dominasi tentara, birokrat dan Golkar.

Perubahan sistem politik itu akhirnya menerpa wilayah politik Sulsel, yang selama ini menjadi ladang dan lumbung partai Golkar. Pemilihan Gubernur Sulsel periode 2003-2008, memperlihatkan warna dan dinamika politik yang sangat kompetitif. Pemain politik pada pemilihan Gubernur kali ini kian beragam, tidak saja diikuti oleh birokrat, tentara dan politisi Golkar, tetapi sudah melibatkan pengusaha, politisi non-Golkar dan birokrat. Meskipun pemilihan itu dimenangkan oleh pasangan politisi Golkar dan birokrat (Mayjen Amin Syam dan Syahrul Yasin Limpo), akan tetapi proses kemenangannya tidak semudah seperti yang terjadi pada pemilihan Gubernur sebelumnya.

Warisan politik kolonial (1905-1945), Orde Lama dan Orde Baru serta sistem politik era reformasi di Sulsel telah melahirkan sejumlah klan elit yang beragam pada setiap level dan wilayah politik. Klan elit politik pada level makro (provinsi) yang dilahirkan aristokrat pada fase 1905-2010 hanya dapat ditelusuri dari wilayah kebangsawanan Bone, sedangkan aristokrat dari kebangsawanan Gowa berhenti sampai pada level mezzo (kabupaten). Meskipun Andi Pangeran Petta Rani diakui bersumber dari perpaduan elit kebangsawanan Bone dan Gowa, tetapi keberlanjutan klan elitnya hanya diwariskan melalui darah kebangsawanan Bone. Lahir elit dari klan ini pada level makro (provinsi dan nasional) antara lain adalah; Jenderal TNI M. Jusuf (mantan Menhamkam, Pangab, dan Menteri Perindustrian), Hery Iskandar (mantan wakil dan Walikota Makassar), A. Mattalata (mantan Menteri Menhamkum, mantan anggota DPR RI), Padjalangi melalui anak-anaknya; A. Yagqien (DPRD Sulsel), A. Fashar (eselon II), dr. A. Khasmawati (eselon II), A. Rio (anggota DPR RI), Prof. Dr. A. Syamsul (mantan Pembantu Rektor II Unhas), A. Altin Noor (mantan anggota DPRD Sulsel), Irsan Idris Galigo (anggota DPRD Sulsel).

Pada level *mezzo* (kabupaten), elit aristokrat Bone dilanjutkan oleh; Andi Gappa; Andi Santang; Andi Nini; Andi Muharram yang dilanjutkan oleh anak-anaknya; Andi Mula Amir, (mantan Kepala Kecamatan Kajuara), Andi Amir (mantan Bupati Bone periode 1993-2003), Andi Abu Bakar Amir (mantan Kepala Kecamatan Kajuara), Andi Sultan, Andi Nurhasanah (Kepala Kecamatan Kajuara saat penelitian ini berlangsung); Andi Yusuf yang dilanjutkan oleh anak-anaknya; Andi Baso Amir (mantan Bupati Bone periode 1967-1969), dan A. Muhammad Yusuf (mantan Panglima ABRI); Andi Iskandar, dilanjutkan oleh anaknya Andi Hery Iskandar (Mantan Walikota Makassar). A. Idris Galigo (Bupati Bone periode 2004-2014).

Klan A. Pangeran Petta Rani yang melanjutkan eksistensi ke-elit-annya pada level *mezzo* di Gowa adalah A. Idjo Krg Lalolang (mantan kepala daerah wilayah Makassar, yang meliputi Gowa, Takallar dan Jeneponto) pada periode 1955-1961. Kemudian dilanjutkan oleh Andi Madusila (mantan camat di wilayah DKI, mantan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulse, dan mantan calon Bupati Gowad dua kali).

Untuk mempertahankan kekuasaannya, setiap rejim selalu memiliki pola dalam membangun struktur kekuasaannya. Slogan nasionalisasi dan pribumisasi menjadi tema yang diusung rejim Orde Lama, untuk memperkokoh posisi politiknya. Slogan ini kemudian diwujudkan dalam aksi konkrit seperti; mendahulukan kelompok sipil untuk menduduki posisi strategis dalam pemerintahan, kebebasan berpolitik dengan memberi kesempatan semua warga negara untuk berpartisipasi dalam politik melalui kemunculan partai politik, mengurangi peranan aristokrasi dan feudalisme dalam pemerintahan, dengan mendorong lahirnya ilmuwan dan cendekiawan untuk mengisi birokrasi pemerintahan dan jabatan-jabatan sipil yang strategis. Khusus untuk ekonomi, presiden Soekarno menetapkan program Benteng untuk melahirkan pengusaha-pengusaha pribumi yang tangguh.

Pada periode Orde Lama, elit politik Sulse yang lahir dari kebijakan politik Soekarno antara lain; Lanto Dg Pasewang dari etnis Makassar (Kabupaten Jeneponto), A. Burhanuddin dari etnis Bugis Wajo, melalui politik pencerdasan dan usaha mereduksi peranan sosial politik kaum aristokrat, dan pengurangan eksistensi kalangan feodal. Sedangkan elit yang dilahirkan dari sektor ekonomi melalui program Benteng di Sulse antara lain adalah; NV. Hadji Kalladan PT. Aslam. Posisi elit ekonomi Hadji Kalla terus berlanjut hingga era reformasi. Sedangkan Aslam "ditumbang" oleh rejim Orde Baru. Hampir semua aset yang dimiliki oleh Aslam disita untuk kepentingan kekuasaan Orde Baru.

Lanto Dg Pasewang yang memasuki jalur kekuasaan tidak meninggalkan jejak kekuasaan politik yang menonjol pada generasinya. Pasewang dan keluarganya tidak menunjukkan aktivitas yang memadai untuk memelihara kesinambungan kekuasaannya. Sebaliknya, Kalla sebagai pengusaha mampu menangkap semua peluang ekonomi dan politik yang ada, meskipun terjadi gelombang perubahan politik.

Rejim Orde Baru memiliki cara yang berbeda dengan Soekarno dalam hal membentuk elit. Elit-elit pada zaman Soekarno lahir dari rahim politik melalui kekuasaan partai politik. Sedangkan Soeharto menciptakan elit dengan berbagai jalur. Jalur politik, rejim Orde Baru mengandalkan kekuatan mayoritas Golkar yang didukung oleh tentara dan birokrasi. Soeharto tidak membiarkan elit ekonomi pribumi berkembang seperti yang diharapkan Soekarno. Elit ekonomi pribumi tidak diberikan ruang untuk kawin mawin dengan penguasa. Kecuali pada sedikit kasus, yakni konco-konco terdekat Soeharto. Ekonomi Indonesia di bawah rejim Soeharto sepenuhnya dikontrol oleh pengusaha keturunan China. Tentara lebih dipercaya mengelola ekonomi ketimbang pengusaha pribumi. Langkah ini rupanya bagian dari strategi Soeharto untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaannya.

Di Sulse, elit-elit produk Orde Baru bermunculan dengan berbagai cara. Namun elit hasil produksi tentara jauh lebih unggul dibanding dengan proses pembentukan elit pada sektor lain. Elit yang dihasilkan oleh tentara telah membentuk aktor-aktor yang memiliki kekuatan dan kekuasaan politik yang besar. Apalagi kalau aktor-aktor itu memiliki kemampuan menjadi inspirator organisasi politik, bisa mengelola organisasi masyarakat, dan mempunyai jaringan untuk mengembangkan bisnis.

Elit tentara di Sulse yang paling sukses membentuk klan politik yang lahir dari rongga kekuasaan Orde Baru adalah Kolonel Yasin Limpo. Yasin Limpo tidak saja sukses secara pribadi sebagai tentara, politikus dan pimpinan sejumlah organisasi sosial dan bisnis, tetapi ia juga mampu mewariskan kecerdasan sosial politiknya sampai pada generasi ketiga (saat ini). Regim Orde Baru melihat Yasin Limpo memiliki talenta memenej konflik, itu sebabnya Markas Besar TNI selalu menugaskan Yasin Limpo menjadi pelaksana tugas pemerintah di beberapa daerah yang sedang bermasalah. Pengalaman sosial politik yang dimilikinya, ia jadikan sebagai asset politik dalam keluarga besarnya.

Keberhasilan Yasin Limpo membangun struktur kekuasaan melalui jalur tentara, tidak diikuti oleh aktor-aktor lain pada etnis Makassar, maupun di Gowa. Sepanjang rejim Soeharto tidak terdapat aktor elit lain, selain Yasin Limpo di Gowa yang tumbuh sebagai satu kekuatan sosial politik maupun ekonomi. Kelahiran elit-elit baru pada level *mezo* di Kabupaten Gowa, tetap tidak terlepas dari kontrol klan Yasin Limpo. Secara umum, Orde Baru tidak menggunakan etnis Makassar sebagai jejaring sosial maupun politiknya. Keadaan ini membuat posisi klan Yasin Limpo menjadi semakin tangguh. Yasin Limpo tumbuh tunggal dalam lapangan sosial etnis Makassar, terutama di Kabupaten Gowa. Klan ini kemudian menjadi payung tunggal besar bagi sejumlah elit-elit kecil yang baru tumbuh di wilayah Makassar. Hampir semua elit-elit baru pada etnis Makassar, menjadikan klan Yasin Limpo sebagai tempatnya bernaung dan berguru.

Kenyataan ini berbeda dengan yang terjadi pada etnis Bugis Bone. Elit Bone produk aristokrasi masih bertahan sebagai elit hingga Orde reformasi. Klan yang paling disegani di Bone adalah klan Arung Tarasu. Klan inilah

yang kemudian melahirkan sejumlah nama besar yang menguasai Bone hingga kancah nasional. Salah seorang tokoh yang cukup dikenal dari klan ini adalah Jenderal M. Jusuf. Klan ini memiliki struktur kekuasaan yang sempurna, itu sebabnya, meskipun tumbuh elit baru pada masa Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi, akan tetapi tidak mampu menggeser struktur kekuasaan yang amat mapan yang dimiliki oleh klan Arung Tarasu, yang dilahirkan oleh rahim aristokrasi, jauh sebelum Indonesia merdeka.

M. Jusuf Kalla (JK) dan Nurdin Halid (NH) adalah elit dari etnis Bugis Bone yang lahir relatif baru dibandingkan dengan klan Arung Tarasu. JK dan NH adalah elit hasil produksi rejim Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi melalui jejaring bisnis. Klan Kalla adalah klan produk tiga rejim; Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Sedangkan NH, tumbuh dari jejaring bisnis keluarga Orde Baru, melalui Badan Penyelenggara dan Pemasaran Cengkeh (BPPC). NH sendiri memulai usaha dari membangun Koperasi, sampai puncaknya ia mendirikan Pusat KUD (Puskud) Hasanuddin Sulsel. Dari sinilah ia mengembangkan berbagai jenis usaha, dan mulai ditopang oleh dana BPPC. Setelah rejim Orde Baru ambruk dari kekuasaannya yang absolut, dan digantikan oleh Rejim Reformasi, NH turut jatuh dari gelanggang politik dan bisnis, karena kemudian tersangkut sejumlah masalah hukum, dan masuk penjara. Setelah bebas dari penjara, karirnya kembali berkibar, ia menjadi salah satu pengurus harian DPP Partai Golkar (2009-2014), dan tetap menjadi ketua umum PSSI selama dua periode. NH memiliki daya tahan politik dan bisnis yang luar biasa, dari dalam penjara ia masih bisa kendalikan sejumlah organisasi dan bisnisnya. Hampir dua tahun ia kontrol PSSI dibalik terali besi penjara. Beberapa adiknya tidak lagi hanya mengurus bisnis dan bola (salah seorang adiknya adalah manajer PSM Makassar), tetapi juga sudah merambah dunia politik. Kadir Halid dan Rahman Halid adalah pengurus inti Partai Golkar Sulsel dan Partai Hanura Sulsel. Saat ini, Kadir Halid sudah terpilih sebagai anggota DPRD Sulsel.

DAFTAR PUSTAKA

- Bulbeck, David, Ian Caldwell. 2000. *Land of iron: the Historical Archaeology of Luwu and the Cenrana valley : results of the Origin of Complex Society in South Sulawesi*. Project (OXIS). Centre for South-East Asian Studies, University of Hull.
- Caldwell, Ian. 1999. *The Jurnal of Southeast Asian Studies*. 30 (2). Canberra.
- . 2005. *The Rule Of Four*. Penerbit Serambi.
- Cummings, William. 2002. *Making Blood White: Historical Transformations In Early Modern Makassar*. University of Hawaii Press.
- Gibson, Thomas. 2005. *And The Sun Pursued the Moon: Symbolic Knowledge and Traditional Authority among the Makassar*. Honolulu: University of Hawai'i Press.

- Hall, D.G.E. 1988. *Sejarah Asia Tenggara*. (Penerjemah I.P. Soewarsha dan Penyunting M.H. Mustopo). Surabaya: Penerbit Usaha Nasional.
- Harvey, Barbara S. 1989. *Pemberontakan Kahar Mudzakkar: dari Tradisi ke DI/TII*. Jakarta: Graffiti Press.
- Ijzereef, Willem. 1987. *Power and Political Structure in the Kingdom of Bone, 1860-1949*. Royal Institute of Linguistics and Anthropology.
- Kooreman, P.J. 1883. *De feitelijke toestand in het gouvernementsgebied van Celebes en onderhoorigheeden*, De Indische Gids 5-I:171-204, 358-84, 482-98, 637-55; 5-II:135-69, 346-58.
- Millar, Susan B. 1989. *Bugis weddings: rituals of social location in modern Indonesia*. Center for South and Southeast Asia Studies, University of California at Berkeley.
- Mukhlis PaEni. 1986. *Dinamika Bugis-Makassar*, Jakarta: P.T. Sinar Krida.
- Pelras, Christian. 2006. *Manusia Bugis*, Nalar bekerjasama dengan Forum Jakarta-Paris, EFEO, Jakarta.
- Putra, Heddy Ahimsa. 1988. *Minawang: Hubungan Patron-Klien di Sulsel*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ricklefs, M.C. 1991. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.